

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN TPID TRIWULAN I TAHUN 2024 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dan jasa serta resiko kedepan. □ Perkembangan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan barang strategis lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan selama triwulan I bulan Januari – Maret 2024 dengan rincian harga sebagai berikut : Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Pesisir Selatan sebesar 3,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,88. □ Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,97 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,97 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,67 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,06 persen. □ Tingkat inflasi Kabupaten Pesisir Selatan bulan Maret 2024 secara month to month (m-to-m) sebesar 0,47 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,18 persen. □ Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah Non IHK yang tidak melakukan penghitungan tingkat inflasi daerah, perhitungan inflasi mengacu kepada Kabupaten Pesisir Selatan, untuk perkembangan inflasi daerah dilakukan dengan memperhatikan harga pasar harian di Pasar Inpres Painan pada hari pasar baik itu pasar kecamatan. 2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada awal triwulan I (bulan Januari) yaitu terjadinya peningkatan atau kenaikan harga Minyak goreng yang sangat signifikan. □ sebagai akibat dari perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi musim panen di daerah lain . □ Pada akhir triwulan I harga komoditas cabai keriting merah, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau karena kurangnya permintaan terhadap komoditas dan tersedianya pasokan yang cukup. 3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di daerah Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I berdasarkan aspek 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) adalah sebagai berikut : a. Keterjangkauan Harga • Pemantauan stok harga pangan tingkat Grosir di UD Ar-Razag jalan diponegoro Painan • bahan kebutuhan pokok di pasar Inpres Painan dan beberapa pasar di kecamatan. • Pelaksanaan Operasi Pasar di Pasar bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bulog • Pengawasan stok persediaan • Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor. b. Ketersediaan Pasokan • tanaman bawang merah dengan menggunakan teknologi pertanian Dilakukan juga gerakan menanam tanaman cabe pada Kelompok Wanita Tani serta Penanaman di Pekarangan. • Pengembangan Tanaman Cabai dengan adanya kegiatan Kampung Cabai melalui pemberian sarana dan prasarana serta pelatihan sekolah lapang serta pengembangan. c. Kelancaran Distribusi • Koordinasi dengan distributor untuk kelancaran distribusi barang. d. Komunikasi yang Efektif • Pelaksanaan kebijakan untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan. • Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID • Sosialisasi Pelaksanaan Program unggulan Asuransi Pertanian Tahun anggaran 2022 kepada penyuluh dan kelompok tani mengenai manfaat dari asuransi pertanian pada padi dan ternak sapi/kerbau. (15 Juli 2022) • Mengikuti Rapat Koordinasi HLM TPID se Sumbar di Ruang Pertemuan Bank Indonesia Prov.Sumbar dengan agenda Pembahasan

perkembangan dan tekanan inflasi terkini serta upaya pengendalian inflasi ditengah tingginya resiko inflasi Sumbar.(31 agust 22) 4. . Evaluasi Kebijakan Pengendalian inflasi di Daerah □ Pelaksanaan operasi pasar mampu menstabilkan harga di pasar. □ Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K) meringankan beban peternak ketika ternak mengalami kematian, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) membantu petani yang mengalami gagal panen akibat musim kering yang tidak menentu serta serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. □ Program pemanfaatan pekarangan pangan lestari dapat membantu petani (Kelompok Wanita tani) dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kecukupan gizi keluarga untuk mencegah terjadinya stunting. □ Pelaksanaan sekolah lapang meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan bahan alami sehingga penggunaan pestisida di lapangan dapat dikurangi dan mampu membuat pupuk organik. □ Inseminasi Buatan (IB) melalui embrio transfer untuk meningkatkan perkembang biakan ternak sapi sehingga pemenuhan kebutuhan daging (protein hewani) dapat terpenuhi. 5. Rekomendasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah a. Melanjutkan Program Pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap Penyusunan Peta Inflasi Tahun 2022-2024. b. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka mengantisipasi harga c. Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian sebagai motivator, inovator dan pemberi informasi kepada masyarakat terutama dalam penggunaan teknologi pertanian dan pengembangan wawasan melalui pelatihan. d. Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor barang pokok dan barang strategis lainnya. e. .Melaksanakan kegiatan – kegiatan teknis dengan perangkat daerah terkait yang menunjang pengendalian inflasi daerah sesuai dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) f. Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota untuk saling tukar informasi dalam pengendalian inflasi. g. TPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menindaklanjuti semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan TPID Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. h. Melakukan pelatihan Budidaya Tanaman Bawang di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada awal triwulan I (bulan Januari) yaitu terjadinya peningkatan atau kenaikan harga Minyak goreng yang sangat signifikan. □ sebagai akibat dari perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi musim panen di daerah lain . □ Pada akhir triwulan I harga komoditas cabai keriting merah, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau karena kurangnya permintaan terhadap komoditas dan tersedianya pasokan yang cukup.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di daerah Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I berdasarkan aspek 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) adalah sebagai berikut : a. Keterjangkauan Harga • Pemantauan stok harga pangan tingkat Grosir di UD Ar-Razag jalan diponegoro Painan • bahan kebutuhan pokok di pasar Inpres Painan dan beberapa pasar di kecamatan. • Pelaksanaan Operasi Pasar di Pasar bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bulog • Pengawasan stok persediaan • Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor. b. Ketersediaan Pasokan • tanaman bawang merah dengan

menggunakan teknologi pertanian Dilakukan juga gerakan menanam tanaman cabe pada Kelompok Wanita Tani serta Penanaman di Pekarangan. • Pengembangan Tanaman Cabai dengan adanya kegiatan Kampung Cabai melalui pemberian sarana dan prasarana serta pelatihan sekolah lapang serta pengembangan. c. Kelancaran Distribusi • Koordinasi dengan distributor untuk kelancaran distribusi barang. d. Komunikasi yang Efektif • Pelaksanaan kebijakan untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan. • Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID • Sosialisasi Pelaksanaan Program unggulan Asuransi Pertanian Tahun anggaran 2022 kepada penyuluh dan kelompok tani mengenai manfaat dari asuransi pertanian pada padi dan ternak sapi/kerbau. (15 Juli 2022) • Mengikuti Rapat Koordinasi HLM TPID se Sumbar di Ruang Pertemuan Bank Indonesia Prov.Sumbar dengan agenda Pembahasan perkembangan dan tekanan inflasi terkini serta upaya pengendalian inflasi ditengah tingginya resiko inflasi Sumbar.(3

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian inflasi di Daerah □ Pelaksanaan operasi pasar mampu menstabilkan harga di pasar. □ Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K) meringankan beban peternak ketika ternak mengalami kematian, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) membantu petani yang mengalami gagal panen akibat musim kering yang tidak menentu serta serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. □ Program pemanfaatan pekarangan pangan lestari dapat membantu petani (Kelompok Wanita tani) dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kecukupan gizi keluarga untuk mencegah terjadinya stunting. □ Pelaksanaan sekolah lapang meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan bahan alami sehingga penggunaan pestisida di lapangan dapat dikurangi dan mampu membuat pupuk organik. □ Inseminasi Buatan (IB) melalui embrio transfer untuk meningkatkan perkembangan biakan ternak sapi sehingga pemenuhan kebutuhan daging (protein hewani) dapat terpenuhi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah a. Melanjutkan Program Pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap Penyusunan Peta Inflasi Tahun 2022-2024. b. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka mengantisipasi harga c. Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian sebagai motivator, inovator dan pemberi informasi kepada masyarakat terutama dalam penggunaan teknologi pertanian dan pengembangan wawasan melalui pelatihan. d. Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor barang pokok dan barang strategis lainnya. e. .Melaksanakan kegiatan – kegiatan teknis dengan perangkat daerah terkait yang menunjang pengendalian inflasi daerah sesuai dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) f. Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota untuk saling tukar informasi dalam pengendalian inflasi. g. TPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menindaklanjuti semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan TPID Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. h. Melakukan pelatihan Budidaya Tanaman Bawang di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.